

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NARKOTIKA NO 35 TAHUN 2009 DI KOTA PADANG

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di Kota Padang sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan karena sudah menjerumus ke berbagai kalangan yang ada di Kota Padang.

Tiap tahun penyalahgunaan narkotika ini tidak pernah kekurangan kasus. Efektivitas dari undang – undang narkotika no 35 tahun 2009 benar – benar diuji dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, untuk itu penulis menulis judul tersebut di atas dengan mengangkat permasalahan yaitu, bagaimanakah Efektifitas Undang – Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 dalam memberantas dan mencegah Narkotika di Kota Padang, bagaimanakah cara untuk mencegah dan memberantas pemakaian narkotika di Kota Padang.

Untuk menjawab dari permasalahan ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan secara yuridis empiris dengan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder untuk data awal, yang mana didapatkan dari buku-buku perundangan dan kamus, data primer diperoleh dengan data lapangan dan wawancara dengan instansi terkait seperti BNK Padang dan Poltabes Padang. Kemudian baik data sekunder maupun data primer diperoleh dengan metode yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas, untuk mendapatkan kesimpulan secara general atau umum. Dari hasil penelitian untuk membuktikan efektifitas Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 peranan BNK Padang untuk saat ini baru sebatas preventif yaitu “penyuluhan”, sedangkan untuk peranan represif masih kewenangan dari pihak penyidik yaitu Poltabes Kota Padang.

Dalam tugas preventif BNK Padang tidak mengalami kendala karena didukung penuh oleh Pemerintah Kota, Satgas, LSM, serta pihak Poltabes Kota Padang. Tetapi dari segi kendalanya BNK Padang belum mempunyai gedung sendiri atau lahan sendiri.

Saran perlunya BNK tidak hanya diberi tugas dibidang preventif saja tetapi juga ikut serta diidang represif seperti penangkapan dan memuat laporan tahunan penangkapan kasus narkotika.